



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke Empat dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018–2022. Renja PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun–tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2018-2022 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) PD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2022 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang dan program-program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 894);

- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023;
- 19) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
- 20) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
- 21) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);
- 22) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
- 23) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
- 24) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika .

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2022 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2022;

- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Laporan Kinerja (LK);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

3.3. Program dan Kegiatan

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Renstra Diskominfo Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Kominfo Kota Singkawang Tahun 2020 dan realisasi Renja Tahun Berjalan sampai dengan Bulan Maret 2021 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra SKPD.

2.2.1. Faktor- Faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Di samping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

Renja 2022

URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pembangunan Jaringan CCTV	13 CCTV 450.966.500	13 CCTV 408.694.500	Tidak Ada	Tidak Ada
Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	29 OPD, 26 kelurahan 2.894.698.600	29 OPD, 26 kelurahan 2.803.336.531	Tidak Ada	Tidak Ada
Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	1 perwako Rp. 0,-	1 perwako Rp. 0,-	Sehubungan dengan pandemi Virus Covid 19 maka dilakukan refocusing anggaran yakni pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke anggaran yang berkaitan dengan Covid 19. Salah satu dampak dari refocusing tersebut adalah dilakukan pengurangan anggaran sebesar 100% dan anggaran menjadi nol rupiah.	Perwako tetap dibuat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	100 konten 57.953.100	283 konten 54.772.800	Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan walaupun anggaran tidak bertambah.	Dikarenakan banyak pembuatan konten untuk covid yang dibuat oleh tenaga honorer spesialis konten Dinas Kominfo.
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1 kegiatan 12.090.000	1 kegiatan 11.310.000	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengelolaan Media komunikasi Publik	30 dokumen 34.605.400	93 dokumen 32.032.900	Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan walaupun anggaran tidak bertambah.	Dikarenakan banyak pembuatan konten untuk covid yang dibuat oleh tenaga honorer spesialis konten Dinas Kominfo.
Pemeliharaan dan pengembangan website	12 server 135.788.100	12 server 116.848.100	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik	1 aplikasi 51.303.100	1 aplikasi 51.303.100	Tidak Ada	Tidak Ada
Manajemen Data dan Informasi	1 aplikasi	1 aplikasi	Tidak Ada	Tidak Ada

Renja 2022

URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	108.265.885	108.237.400		
Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	2 aplikasi 62.998.000	2 aplikasi 52.623.000	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengelolaan Control Room	4 orang 564.617.500	4 orang 497.890.500	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	1 buku 169.430.700	1 buku 162.580.700	Tidak Ada	Tidak Ada
Optimalisasi fungsi persandian dan pengamanan informasi dan jaringan komunikasi	25 % 43.021.800	25 % 22.721.800	Tidak Ada	Tidak Ada

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
3. Ketercapaian sasaran strategis perspektif *stakeholder* sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya.

Renja 2022

URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	55 peserta 4.225.000	35 peserta 2.845.000	Sehubungan dengan pandemi Virus Covid 19 maka dilakukan refocusing anggaran yakni pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke anggaran yang berkaitan dengan Covid 19. Salah satu dampak dari refocusing tersebut adalah dilakukan pengurangan anggaran.	Kegiatan tetap dilaksanakan walaupun anggaran dikurangi, namun target peserta yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi berkurang menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi	100 orang Rp. 0,-	0 orang Rp. 0,-	Sehubungan dengan pandemi Virus Covid 19 maka dilakukan refocusing anggaran yakni pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke anggaran yang berkaitan dengan Covid 19. Salah satu dampak dari refocusing tersebut adalah dilakukan pengurangan anggaran sebesar 100% dan anggaran menjadi nol rupiah. Hal ini dikarenakan kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan di masa pandemi karena kegiatan tersebut sifatnya mengumpulkan orang banyak, di mana selama masa pandemi kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.	Dianggarkan kembali untuk tahun 2021 dan jika memungkinkan target peserta untuk tahun 2021 ditambah jumlahnya mengingat pada tahun 2020 kegiatan tidak dapat dilaksanakan agar target yang sudah ditetapkan dalam renstra dapat tercapai.
Peningkatan kapasitas sumber daya Pengelola Informasi Publik	29 OPD Rp. 0,-	0 OPD Rp. 0,-	Sehubungan dengan pandemi Virus Covid 19 maka dilakukan refocusing anggaran yakni pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke anggaran yang berkaitan dengan Covid 19. Salah satu dampak dari refocusing tersebut adalah dilakukan pengurangan anggaran sebesar 100% dan anggaran menjadi nol rupiah. Hal ini dikarenakan kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan di masa pandemi karena kegiatan tersebut sifatnya	Dianggarkan kembali untuk tahun 2021 dan jika memungkinkan target peserta untuk tahun 2021 ditambah jumlahnya mengingat pada tahun 2020 kegiatan tidak dapat dilaksanakan agar target yang sudah ditetapkan dalam renstra dapat tercapai.

Renja 2022

URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			mengumpulkan orang banyak, di mana selama masa pandemi kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.	
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	2400 berita 575.560.000	1200 berita 541.427.600	Terlalu besar dalam menetapkan target	Untuk tahun anggaran 2021 target diturunkan.
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	1100 peserta Rp. 0,-	0 peserta Rp. 0,-	Sehubungan dengan pandemi Virus Covid 19 maka dilakukan refocusing anggaran yakni pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke anggaran yang berkaitan dengan Covid 19. Salah satu dampak dari refocusing tersebut adalah dilakukan pengurangan anggaran sebesar 100% dan anggaran menjadi nol rupiah. Hal ini dikarenakan kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan di masa pandemi karena kegiatan tersebut sifatnya mengumpulkan orang banyak, di mana selama masa pandemi kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.	Dianggarkan kembali untuk tahun 2021 dan jika memungkinkan target peserta untuk tahun 2021 ditambah jumlahnya mengingat pada tahun 2020 kegiatan tidak dapat dilaksanakan agar target yang sudah ditetapkan dalam renstra dapat tercapai.
Konferensi Pers	12 kegiatan 30.538.500	11 kegiatan 15.768.500	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL)	1 kegiatan Rp. 0,-	0 kegiatan Rp. 0,-	Sehubungan dengan pandemi Virus Covid 19 maka dilakukan refocusing anggaran yakni pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke anggaran yang berkaitan dengan Covid 19. Salah satu dampak dari refocusing tersebut adalah dilakukan pengurangan anggaran sebesar 100% dan anggaran menjadi nol rupiah.	Dianggarkan kembali untuk tahun 2021 agar target yang telah ditetapkan dalam renstra dapat tercapai..

Renja 2022

URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Penyusunan master plan TIK	1 dokumen	0 dokumen	Sehubungan dengan pandemi Virus Covid 19 maka dilakukan refocusing anggaran yakni pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke anggaran yang berkaitan dengan Covid 19. Salah satu dampak dari refocusing tersebut adalah dilakukan pengurangan anggaran sebesar 100% dan anggaran menjadi nol rupiah.	Dianggarkan kembali untuk tahun 2021 agar target yang telah ditetapkan dalam renstra dapat tercapai.
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	0 % Rp. 0,-	0 % Rp. 0,-	Sehubungan dengan pandemi Virus Covid 19 maka dilakukan refocusing anggaran yakni pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke anggaran yang berkaitan dengan Covid 19. Salah satu dampak dari refocusing tersebut adalah dilakukan pengurangan anggaran sebesar 100% dan anggaran menjadi nol rupiah. Sehingga kegiatan tersebut dioptimalkan di dalam 1 kegiatan saja yakni Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah.	Dianggarkan kembali untuk tahun 2021 agar target yang telah ditetapkan dalam renstra dapat tercapai.

2.2.2. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Dikarenakan terdapat beberapa program pada tahun akhir 2020 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dikarenakan anggaran lebih terfokus pada penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2018 - 2022. Dengan tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2018 – 2022 sesuai yang direncanakan di tahun pertama pelaksanaan mengakibatkan penambahan target pada penyesuaian target capaian pada Renstra 2018 - 2022.

2.2.3. Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2020 dan Renstra 2018 – 2022.
2. Efisiensi alokasi belanja.
3. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

**Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.10.2.10.01.001.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	500%	95,69%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase jenis layanan administrasi perkantoran	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2 unit	50%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	500%	94%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500%	100%	-	-	-	-	-	-

Renja 2022

2.10.2.10.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	500%	94%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi / konsultasi dalam dan luar daerah	500%	100%	-	-	-	-	-	-

Renja 2022

2.10.2.10.01.001.019	Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyediaan pelayanan administrasi keuangan	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.001.020	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur	500%	933%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.002.013	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kantor	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	500%	100%	-	-	-	-	-	-

Renja 2022

2.10.2.10.01.002.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	500%	98%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.003.	Program Peningkatan Displin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	300%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.003.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	300%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.006.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	500%	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dok	2 dok	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.006.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.006.006	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	5 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-

2.10.2.10.01.007.	Program Penguatan Transparansi Publik	Persentase transparansi publik	500%	0 %	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.007.001	Expo Kinerja SKPD	Pelaksanaan Expo Kinerja SKPD	5 keg	0 keg	-	-	-	-	-	-
4.05.2.10.01.051.	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Persentase penilaian bobot jabatan dalam penetapan standar gaji PNS	500%	100%	-	-	-	-	-	-
4.05.2.10.01.051.012	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	5 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.015.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah anggota KIM yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	85%	75 %	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.015.003	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Jumlah anggota KIM yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	240 peserta	35 peserta	-	-	-	-	-	-

Renja 2022

2.10.2.10.01.015.007	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Perwako yang dikeluarkan	5 perwako	1 perwako	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.015.012	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang tersedia dalam rangka Pelayanan Informasi Publik	485 konten	283 konten	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.017.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan di bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa	95%	0 orang	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.017.001	Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi	Jumlah SDM peserta pelatihan	170 orang	0 %	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.018.	Program Kerjasama informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan kerjasama Informasi dan Media Massa	95%	90 %	-	-	-	-	-	-

Renja 2022

2.10.2.10.01.018.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah kegiatan diseminasi melalui FK Metra	5 keg	1 keg	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.018.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kerjasama Informasi dan media massa	11600 berita	1200 berita	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.018.003	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan internet	5025 peserta	0 peserta	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.018.004	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik	195 60 Video dan Info Grafis, 135 dokumen	93 dok	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.018.005	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Sosialisasi tentang kebijakan layanan informasi publik pengelolaan informasi publik	29 OPD	0 OPD	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.018.006	Konferensi Pers	Jumlah pelaksanaan konferensi pers	60 keg	11 keg	-	-	-	-	-	-

2.10.2.10.01.018.007	Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL)	Kegiatan pengelolaan LPPL	3 keg	0 keg	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.065.	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi e-government	60 %	50%	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.065.003	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	Jumlah server yang dipelihara	85 server	12 server	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.065.007	Pembangunan Jaringan CCTV	Jumlah CCTV yang terpasang	50 cctv	13 cctv	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.065.008	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	Jumlah akses Jaringan Internet yang terkoneksi	55 29 OPD, 26 kelurahan	55 29 OPD 26 kelurahan	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.065.018	Penyusunan Masterplan TIK	Jumlah Dokumen Kajian Masterplan TIK	4 dok	0 dokumen	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.065.022	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik	Jumlah Aplikasi Yang terealisasi	5 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.065.023	Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang diterapkan	5 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-

Renja 2022

2.10.2.10.01.065.024	Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah aplikasi yang berjalan	5 aplikasi	2 aplikasi	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.065.029	Pengelolaan Control Room	Jumlah tenaga operator, teknisi, maintenance peralatan control room	14 orang	4 orang	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.067.	Program Peningkatan dan Pengembangan Persandian	Persentase Pengamanan berita Sandi	35 %	34,5 %	-	-	-	-	-	-
2.10.2.10.01.067.001	Optimalisasi Fungsi Persandian dan Pengamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	35%	25 %	-	-	-	-	-	-
2.14.2.10.01.015.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	60%	4 %	-	-	-	-	-	-
2.14.2.10.01.015.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	400%	0 %	-	-	-	-	-	-

2.14.2.10.01.015.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Buku Kota Singkawang Dalam Angka, PDRB, Statistik Sektoral	5 buku	1 orang	-	-	-	-	-	-
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	12,8%	12,8%	100%	100%	100%
2.16.01.2.01.	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	-	100%	19,05%	19,05%	100%	100%	100%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	-	1 dok	0	0	1 dok	1 dok	100%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	2 dok	-	1 dok	0	0	1 dok	1 dok	100%

Renja 2022

2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	2 dok	-	1 dok	0	0	1 dok	1 dok	100%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	2 dok	-	1 dok	0	0	1 dok	1 dok	100%
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan	2 dok	-	1 dok	0	0	1 dok	1 dok	100%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	6 dok	-	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
2.16.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	-	100%	56,25%	56,25%	100%	100%	100%

2.16.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangannya	24 orang	-	24 orang	25%	25%	24 orang	24 orang	100%
2.16.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Cakupan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/vaerifikasi keuangan SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun	2 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
2.16.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persetase pengadaan barang milik daerah	-	-	-	0	0	-	-	-

2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	-	-	-	0	0	-	-	-
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Cakupan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	0	0	-	-	-
2.16.01.2.04	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.04.04	Pendapatan objek dan pendaftaran objek retribusi daerah	Jumlah menara telekomunikasi yang didata	125 menara telekomunikasi	-	125 menara telekomunikasi	0	0	125 menara telekomunikasi	125 menara telekomunikasi	100%
2.16.01.2.04.06	Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah dokumen SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	250 dok	-	125 dok	0	0	125 dok	125 dok	100%

2.16.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja pegawai 1	2 dok	-	1 dok	0	0	1 dok	1 dok	100%
2.16.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelyanan administrasi umum	100%	-	100%	16,08%	16,08%	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	-	100%	25%	25%	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	-	100%	5%	5%	100%	100%	100%

2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	-	100%	25%	25%	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	-	100%	25%	25%	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.07.05	Pengadaan meubel	Jumlah meubel yang digunakan	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pengadaan gedung kantor yang diadakan	1 unit	-	1 unit	0	0	1 unit	1 unit	100%

2.16.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	12%	12%	100%	100%	100%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	100%	-	100%	25%	25%	100%	100%	100%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan penyediaan jasa umum kantor	100 %	-	100 %	11%	11%	100 %	100 %	100 %
2.16.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	-	100%	25%	25%	100%	100%	100%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	100%	-	100%	25%	25%	100%	100%	100%

	lapangan	lapangan yang disediakan								
2.16.01.2.10	Pemeliharaan/rehabinsli tasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	154 unit	-	77 unit	25%	25%	77 unit	77 unit	100%
2.16.01.2.13	Penataan organisasi	Persentase pelaksanaan penataan organisasi	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.16.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Nilai PMPRB dinas Kominfo	29	-	26	0	0	29	29	100%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	-	100%	33,5%	33,5%	100%	100%	100%

2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik daerah	100%	-	100%	25%	25%	100%	100%	100%
2.16.02.2.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah perwako yang dibutuhkan	2 perwako	-	1 perwako	0	0	1 perwako	1 perwako	100%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan/rekomendasi hasil monitoring opini dan aspirasi publik	2 Laporan	-	-	0	0	0	0	0
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi publik	200 konten	-	100 konten	90 konten	90%	100 konten	100 konten	100%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah informasi/berita yang dipublikasikan	1400 berita	-	700 berita	140 berita	20%	700 berita	700 berita	100%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan melalui website PPID	90 dok	-	45 dok	60 dok	133,33%	45 dok	45 dok	100%

2.16.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Jumlah konferensi pers yang dilaksanakan	24 kegiatan	-	12 kegiatan	3 keg	25%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah peserta pembinaan, pemberdayaan, dan desimilasi informasi melalui komunikasi	2600 orng	-	1300 orng	0	0	1300 orng	1300 orng	100%
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kegiatan	-	-	0	0	0	0	0
2.16.02.2.01.10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	-	29 OPD	0	0	29 OPD	29 OPD	100%
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	-	-	0	0	0	0	0

2.16.01.2.01.13	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	-	100%	0	0	0	0	0
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan aplikasi e-Government	100%	-	100%	30%	30%	100%	100%	100%
2.16.03.2.01	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	-	100%	25%	25%	100%	100%	100%
2.16.03.2.02	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan	Jumlah domain dan subdomain Pemkot Singkawang yang	80 sistem	-	76 sistem	76 sistem 12 server	100%	80 sistem 13 server	80 sistem 13 server	100%

	pemerintahan daerah kabupaten/kota	terbangun Jumlah ruang server yang dirawat	13 server		12 server		100%			
2.16.03.2.03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah akses jaringan internet yang terkoneksi Jumlah CCTV yang terpasang Jumlah menara telekomunikasi yang dibangun	26 kelurahan 29 OPD 10 CCTV 1 menara telekomunikasi	-	26 kelurahan 29 OPD 10 CCTV 1 menara telekomunikasi	26 kelurahan 29 OPD 10 CCTV 1 menara telekomunikasi	100%	26 kelurahan 29 OPD 10 CCTV 1 menara telekomunikasi	26 kelurahan 29 OPD 10 CCTV 1 menara telekomunikasi	100%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-goverement dilinkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pengelolaan e-goverement dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	-	100%	35%	35%	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Persentase koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	50 %	-	50 %	16,67%	33,34%	50 %	50 %	100%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis	Jumlah pengembangan	6 aplikasi	-	3 aplikasi	1 aplikasi	33,33%	3 aplikasi	3 aplikasi	100%

	elektronik	aplikasi Jumlah tenaga operator dan teknisi	5 orang		5 orang	5 orang	100%	5 orang	5 orang	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Persentase pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah	50 %	-	50 %	50%	100%	50 %	50 %	100%
2.16.03.2.02.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Indeks SPBE pemerintah kota Singkawang	2,5	-	2,25	0	0	2,5	2,5	100%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan website	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%

Renja 2022

2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah laporan/publikasi database statistik sektoral Kota Singkawang (tahun n-1)	2 buku	-	1 buku	0	0	1 buku	1 buku	100%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Singkawang	-	-	-	0	0	-	-	-
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Laporan/Publikasi Metadata Indikator sesuai Dokumen Perencanaan Tahunan Kota Singkawang (Thun n+1)	-	-	-	0	0	-	-	-
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur pendukung penyelenggaraan statistik sektoral	-	-	-	0	0	-	-	-

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Penyelenggaraan pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	100%	0	0	100%	100%	100%
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat keputusan Kepala Dinas tentang standar operasional prosedur tata kelola persandian dan keamanan informasi Pemerintah Kota dan indeks keamanan informasi (indeks KAMI)	2 dok	-	1 dok	0	0	1 dok	1 dok	100%

Renja 2022

2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah kegiatan keamanan informasi pemerintah kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 kegiatan	-		0	0	-	-	-
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan peralatan pendukung keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	-	-		0	0	-	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sesuai dengan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2018 - 2022, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dalam hal kinerja pelayanan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Layanan SPBE	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 2	-	-	Level 2	Level 2	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam

persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi

komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi yang masih belum menyentuh secara menyeluruh pada lapisan masyarakat utamanya bagi yang ada di wilayah perdesaan.
2. Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, lingkup OPD, dan pada lingkup masyarakat.
3. Belum optimalnya tingkat keterbukaan informasi public secara menyeluruh pada wilayah Kota Singkawang.
4. Pengelolaan sarana Komunikasi dan informasi baik berupa televisi maupun radio masih sangat terbatas baik dari jangkauan siaran maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kota Singkawang. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2022 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi secara bertahap dan menyeluruh.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga mampu untuk merancang, melakukan evaluasi metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
3. Meningkatkan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan system teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima pemerintah Kota Singkawang kepada masyarakat.
4. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian *e-Government* yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala.
5. Pemanfaatan jaringan Internet untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Singkawang	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.542.779.134,90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Singkawang	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.542.779.134,90	-
A	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Singkawang	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	100%	54.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Singkawang	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	100%	54.000.000,00	-

	Daerah		Perangkat Daerah			Daerah		Perangkat Daerah			
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Singkawang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	12.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Singkawang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	12.000.000,00	-
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	-
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	-
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Singkawang	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	-
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Singkawang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Singkawang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	-
6	Koordinasi dan	Singkawang	Jumlah dokumen	1 dok	6.000.000,00	Koordinasi dan	Singkawang	Jumlah dokumen	1 dok	6.000.000,00	-

	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		laporan capaian kinerja perangkat daerah			penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		laporan capaian kinerja perangkat daerah			
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Singkawang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dok	12.000.000,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Singkawang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dok	12.000.000,00	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.056.719.001,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.056.719.001,00	-
8	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Singkawang	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangannya	24 orang	2.807.181.501,00	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Singkawang	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangannya	24 orang	2.807.181.501,00	-
9	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Singkawang	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	239.537.500,00	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Singkawang	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	239.537.500,00	-
10	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Singkawang	Cakupan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	4.000.000,00	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Singkawang	Cakupan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	4.000.000,00	-
11	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir	Singkawang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	6.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir	Singkawang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	6.000.000,00	-

	tahun SKPD					tahun SKPD					
C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	10.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	10.000.000,00	-
12	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Singkawang	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 dok	5.000.000,00	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Singkawang	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 dok	5.000.000,00	-
13	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Singkawang	Cakupan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	5.000.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Singkawang	Cakupan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	5.000.000,00	-
D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	22.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	22.000.000,00	-
14	Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	Singkawang	Jumlah menara telekomunikasi yang didata	125 Unit	6.000.000,00	Pendapatan dan pendaftaran objek retribusi daerah	Singkawang	Jumlah menara telekomunikasi yang didata	125 unit	6.000.000,00	-
15	Penetapan wajib retribusi daerah	Singkawang	Jumlah dokumen SKRD	125 dok	6.000.000,00	Penetapan wajib retribusi daerah	Singkawang	Jumlah dokumen SKRD	125 dok	6.000.000,00	-
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	937.380.360,90	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	937.380.360,90	

16	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Singkawang	Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 dok	6.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Singkawang	Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 dok	6.000.000,00	-
F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Singkawang	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	937.380.360,90	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Singkawang	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	937.380.360,90	
17	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Singkawang	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	9.407.412,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Singkawang	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	9.407.412,00	-
18	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Singkawang	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	248.706. 589,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Singkawang	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	248.706. 589,00	-
19	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Singkawang	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	72.213.240,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Singkawang	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	72.213.240,00	-
20	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Singkawang	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	7.413.120,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Singkawang	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	7.413.120,00	-
21	Rapat-rapat	Singkawang	Cakupan rapat-rapat	100%	600.000.000,00	Penyelenggaraan	Singkawang	Rapat-rapat kordinasi	100%	600.000.000,00	-

	kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		koordinasi dan konsultasi keluar daerah			rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		dan konsultasi ke luar daerah			
G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Singkawang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.126.526.899,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Singkawang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.126.526.899,00	-
22	Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Singkawang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Mobil operasional dan kendaraan motor 2	560.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Singkawang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Mobil operasional dan kendaraan motor 2	560.000.000,00	-
23	Pengadaan mebel	Singkawang	Jumlah mebel yang disediakan	1 paket	226.096.899,00	Pengadaan mebel	Singkawang	Jumlah mebel yang disediakan	1 paket	226.096.899,00	-
24	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Singkawang	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	340.430.000,00	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Singkawang	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	340.430.000,00	-
H	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.176.157.906,00	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.176.157.906,00	-
25	Penyediaan jasa surat menyurat	Singkawang	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100%	2.527.800,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Singkawang	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100%	2.527.800,00	-

26	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Singkawang	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	274.998.416,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Singkawang	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	274.998.416,00	-
27	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Singkawang	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	898.631.690,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Singkawang	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	898.631.690,00	-
I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Enunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	Peresentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	147.994.968,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Enunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	Peresentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	147.994.968,00	-
28	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Singkawang	Cakupan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	93.280.000.00	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Singkawang	Cakupan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	93.280.000.00	-
29	Pemeliharaaa/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Singkawang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	77 Unit	54.714.968,00	Pemeliharaaa/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Singkawang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	77 Unit	54.714.968,00	-

II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Singkawang	Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	1.293.087.368,70	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Singkawang	Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	1.293.087.368,70	-
I	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	Singkawang	Presentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah	100%	1.293.087.368,70	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	Singkawang	Presentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah	100%	1.293.087.368,70	-
30	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Singkawang	Jumlah perwako yang dikeluarkan	1 perwako	26.555.130,00	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Singkawang	Jumlah perwako yang dikeluarkan	1 perwako	26.555.130,00	-
31	Monitoring opini dan aspirasi publik	Singkawang	Jumlah laporan/rekomendasi hasil monitoring opini dan aspirasi publik	2 laporan	50.000.000,00	Monitoring opini dan aspirasi publik	Singkawang	Jumlah laporan/rekomendasi hasil monitoring opini dan aspirasi publik	2 laporan	50.000.000,00	-
32	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Singkawang	Jumlah konten yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi publik	100 konten	141.529.061,00	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Singkawang	Jumlah konten yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi publik	100 konten	141.529.061,00	-
33	Pengelolaan media	Singkawang	Jumlah	700	508.693.872,00	Pengelolaan media	Singkawang	Jumlah informasi/berita	700	508.693.872,00	-

	komunikasi publik		informasi/berita yang dipublikasikan	berita		komunikasi publik		yang dipublikasikan	berita		
34	Pelayanan informasi publik	Singkawang	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan melalui website PPID	45 dokumen	17.773.648,00	Pelayanan informasi publik	Singkawang	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan melalui website PPID	45 dokumen	17.773.648,00	-
35	Layanan hubungan media	Singkawang	Jumlah konferensi pers yang dilaksanakan	12 kegiatan	36.335.670,00	Layanan hubungan media	Singkawang	Jumlah konferensi pers yang dilaksanakan	12 kegiatan	36.335.670,00	-
36	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Singkawang	Jumlah peserta kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan desiminasi informasi melalui komunitas	1300 orang	320.839.747,00	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Singkawang	Jumlah peserta kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan desiminasi informasi melalui komunitas	1300 orang	320.839.747,00	-
37	Manajemen komunikasi krisis	Singkawang	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kegiatan	35.000.000,00	Manajemen komunikasi krisis	Singkawang	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kegiatan	35.000.000,00	-
38	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Singkawang	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kegiatan layanan informasi publik	29 OPD	19.840.850,00	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Singkawang	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kegiatan layanan informasi publik	29 OPD	19.840.850,00	-
39	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Singkawang	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	35.000.000,00	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Singkawang	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	35.000.000,00	-
40	Penyediaan/penyad	Singkawang	Persentase	100%	101.519.391,00	Penyediaan/penyad	Singkawang	Persentase	100%	101.519.391,00	-

	aan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota			aan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota			
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Singkawang	Persentase Penerapan aplikasi e-Government	100%	4.728.829.250,00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Singkawang	Persentase Penerapan Aplikasi E-Government	100%	4.728.829.250,00	-
J	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.665.452.290,00	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.665.452.290,00	-
41	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi	Singkawang	Jumlah domain dan sub domain pemkot Singkawang yang terbangun dan jumlah ruang server yang dirawat	17 Server 90 Sistem	195.000.000,00	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Singkawang	Jumlah domain dan sub domain pemkot Singkawang yang terbangun dan jumlah ruang server yang dirawat	17 Server 90 Sistem	195.000.000,00	-

						kabupaten/kota					
42	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Singkawang	Jumlah CCTV yang terpasang, jumlah akses jaringan internet yang terkoneksi dan jumlah menara telekomunikasi yang dibangun	60%	3.470.452.290,00	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Singkawang	Jumlah CCTV yang terpasang, jumlah akses jaringan internet yang terkoneksi dan jumlah menara telekomunikasi yang dibangun	60%	3.470.452.290,00	-
K	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.063.376.960,00	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.063.376.960,00	-
43	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Singkawang	Persentase koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	5 kecamatan 11 CCTV 24 OPD 26 kelurahan	71.470.710,00	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Singkawang	Persentase koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	5 kecamatan 11 CCTV 24 OPD 26 kelurahan	71.470.710,00	-
44	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Singkawang	Jumlah pengembangan aplikasi dan jumlah tenaga operator,teknisi,	50%	542.835.625,00	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Singkawang	Jumlah pengembangan aplikasi dan jumlah tenaga operator,teknisi, maintanance peralatan dan control room	50%	542.835.625,00	-

			maintanance peralatan dan control room								
44	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Singkawang	Persentase pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah	4 aplikasi 6 orang	199.070.625,00	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Singkawang	Persentase pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah	4 aplikasi 6 orang	199.070.625,00	-
45	Monitoring, evaluasi, pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Singkawang	Pindeks SPBE pemerintah kota Singkawang	75%	250.000.000.00	Monitoring, evaluasi, pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Singkawang	indeks SPBE pemerintah kota Singkawang	75%	250.000.000.00	-
IV	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Terintegrasi Dengan Website	100%	730.000.000,00	PROGRAM PEMYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Terintegrasi Dengan Website	100%	730.000.000,00	-
L	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	100%	480.000.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	100%	480.000.000,00	-
46	Peningkatan kapasitas SDM	Singkawang	Jumlah bimbingan teknis terkait	1 kegiatan	150.000.000.00	Peningkatan kapasitas SDM	Singkawang	Jumlah bimbingan teknis terkait	1 kegiatan	150.000.000.00	-

	pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		penyelenggaraan statistik sektoral kota Singkawang			pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		penyelenggaraan statistik sektoral kota Singkawang			
47	Membangun metadata statistik sektoral	Singkawang	Jumlah laporan/publikasi metadata indikator sesuai dokumen perencanaan tahunan kota Singkawang	1 Buku	150.000.000,00	Membangun metadata statistik sektoral	Singkawang	Jumlah laporan/publikasi metadata indikator sesuai dokumen perencanaan tahunan kota Singkawang	1 Buku	150.000.000,00	-
48	Pengembangan infrastruktur	Singkawang	Tersedianya infrastruktur pendukung penyelenggaraan statistik sektoral	1 paket	180.000.000,00	Pengembangan infrastruktur	Singkawang	Tersedianya infrastruktur pendukung penyelenggaraan statistik sektoral	1 paket	180.000.000,00	-
V	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	162.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	162.000.000,00	-
M	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Singkawang	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%	162.000.000,00	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Singkawang	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah	100%	162.000.000,00	-

	Informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota		Daerah Kabupaten/Kota			
49	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	Jumlah surat keputusan kepala dinas tentang standar operasional prosedur tata kelola persandian dan keamanan informasi pemerintah Kota dan indeks keamanan informasi (Indeks KAMI)	2 Dokumen	100.000.000.00	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	Jumlah surat keputusan kepala dinas tentang standar operasional prosedur tata kelola persandian dan keamanan informasi pemerintah Kota dan indeks keamanan informasi (Indeks KAMI)	2 Dokumen	100.000.000.00	-
50	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	Jumlah ketersediaan peralatan pendukung keamanan informasi pemerintah daerah/kota	3 paket	62.000.000.00	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	Jumlah ketersediaan peralatan pendukung keamanan informasi pemerintah daerah/kota	3 paket	62.000.000.00	-

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.4.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Tidak Ada Usulan					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

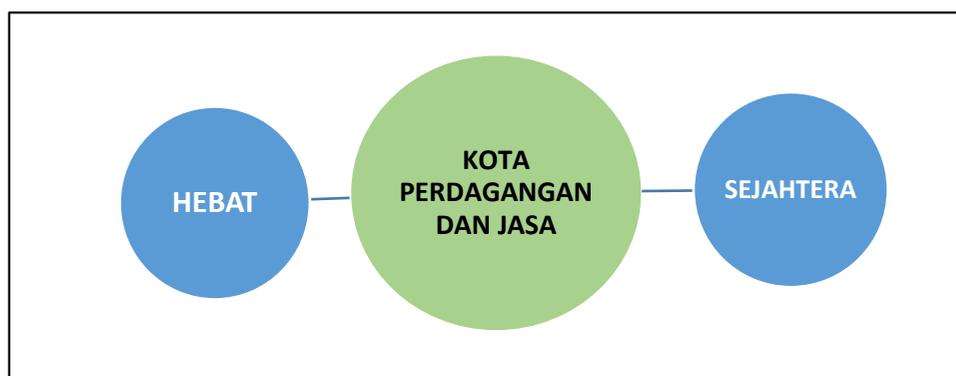
Visi Walikota Singkawang dan Wakil Walikota Singkawang Periode Tahun 2018 - 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah :

“Singkawang HEBAT 2022”

Kata **“HEBAT”** yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya; **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri; **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah; **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan; **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Visi tersebut memiliki elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan dan jasa yaitu **hebat** dan **sejahtera**.



Visi tersebut mengandung maksud bahwa Singkawang sebagai kota yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat mengandung arti bahwa masyarakat Kota Singkawang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kota Singkawang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya.

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

c. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan.

Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota.

Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata.

Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat, Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang.

Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi;
- 5) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Dan Cerdas;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah Dan Berkesinambungan;
- 7) Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata.

Dari Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, Diskominfo merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka dalam merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2018-2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Misi ke empat

yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi, tujuannya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi serta sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

3.1.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

Telaah terhadap RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran yang terukur setiap tahunnya dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 pada RPJMD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Penjabaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari uraian tersebut di atas, Diskominfo Kota Singkawang memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Singkawang. Peran strategis Diskominfo untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kota Singkawang terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

3.1.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019 DAN RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 – 2024

3.1.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut.

Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1 Rumusan 2.2 Rumusan Misi 27 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.1.3.2 TELAAHAN RENSTRA DISKOMINFO PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 - 2023

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025, maka visi pembangunan daerah tahun 2018–2023 yang akan direalisasikan adalah:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Di antara misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

Tugas dan Fungsi Diskominfo

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 71 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW. Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Kawasan Pendidikan;
- 4) Kawasan Industri;
- 5) Kawasan Olahraga;
- 6) Kawasan Wisata/Rekreasi;
- 7) Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- 8) Kawasan Pemakaman Umum;
- 9) Kawasan Khusus;
- 10) Kawasan Cagar Budaya;
- 11) Kawasan Pertanian;
- 12) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara;
- 13) Kawasan Budi Daya Sumber Daya Alam;
- 14) Kawasan Strategis;
- 15) Kawasan Hutan Lindung;
- 16) Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 17) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RT RW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RT RW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Singkawang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- 1) Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RT RW;
- 2) Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
- 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Adapun tujuan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah **Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi**. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tujuan : Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran :

Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi, dengan indikator sasaran :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 2) Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TIK dengan baik;
- 3) Persentase Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

- 4) Persentase tertanganinya pengaduan masyarakat;
- 5) Tercapainya diseminasi informasi ke masyarakat;
- 6) Terlaksananya penyebaran informasi daerah;
- 7) Terpenuhinya infrastruktur TIK di Kota Singkawang;
- 8) Terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintah.

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	100%	4.327.739.657,00	APBD Kota	-	100%	6.542.779.134,90
2.16.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singkawang	100%	46.306.652,00	APBD Kota	-	100%	54.000.000,00

2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Singkawang	1 dok	11.191.954,00	APBD Kota	-	1 dok	12.000.000,00
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Singkawang	1 dok	6.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	6.000.000,00
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Singkawang	1 dok	4.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	6.000.000,00
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Singkawang	1 dok	4.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	6.000.000,00
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan	Singkawang	1 dok	4.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	6.000.000,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Singkawang	1 dok	5.917.146,00	APBD Kota	-	1 dok	6.000.000,00

2.16.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Singkawang	3 dok	11.197.552,00	APBD Kota	-	4 dok	12.000.000,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Singkawang	100%	2.943.801.179,00	APBD Kota	-	100%	3.056.719.001,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangannya	Singkawang	24 orang	2.755.244.922,00	APBD Kota	-	24 orang	2.807.181.501,00
2.16.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Singkawang	100%	180.000.000,00	APBD Kota		100%	239.537500,00
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Cakupan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Singkawang	100%	2.986.220,00	APBD Kota		100%	4.000.000,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun	Singkawang	1 dok	5.570.037,00	APBD Kota		1 dok	6.000.000,00
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	100%	10.000.000,00
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	1 dok	5.000.000,00

2.16.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Cakupan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	100%	5.000.000,00
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Singkawang	100%	24.676.004,00	APBD Kota	-	100%	28.000.000,00
2.16.01.2.04.04	Pendapatan objek dan pendaftaran objek retribusi daerah	Jumlah menara telekomunikasi yang didata	Singkawang	125 menara telekomunikasi	19.560.500,00	APBD Kota	-	125 menara telekomunikasi	22.000.000,00
2.16.01.2.04.06	Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah dokumen SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	Singkawang	125 dok	5.115.504,00	APBD Kota	-	125 dok	6.000.000,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	100%	6.000.000,00
2.16.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja pegawai 1	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	1 dok	6.000.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Singkawang	100%	409.486.822,00	APBD Kota	-	100%	937.380.360,90

2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Singkawang	100%	8.223.554,00	APBD Kota	-	100%	9.047.412,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Singkawang	100%	60.000.000,00	APBD Kota	-	100%	248.706.588,90
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Singkawang	100%	47.325.768,00	APBD Kota	-	100%	72.213.240,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Singkawang	100%	3.937.500,00	APBD Kota	-	100%	7.413.120,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Singkawang	100%	290.000.000,00	APBD Kota	-	100%	600.000.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	100%	1.126.526.899,00
2.16.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	Mobil operasional dan kendaraan motor 2	560.000.000,00
2.16.01.2.07.05	Pengadaan meubel	Jumlah meubel yang digunakan	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	1 paket	226.096.899,00

2.16.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pengadaan gedung kantor yang diadakan	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	1 unit	340.430.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	100%	822.469.000,00	APBD Kota	-	100%	1.176.157.906,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	Singkawang	100%	2.413.000,00	APBD Kota	-	100%	2.527.800,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Singkawang	100%	193.056.000,00	APBD Kota	-	100%	274.998.416,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan penyediaan jasa umum kantor	Singkawang	100 %	627.000.000,00	APBD Kota	-	100%	898.631.690,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Singkawang	100%	100.000.000,00	APBD Kota	-	100%	147.994.968,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Singkawang	100%	51.000.000,00	APBD Kota	-	100%	93.280.000,00
2.16.01.2.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	Singkawang	77 unit	49.000.000,00	APBD Kota	-	77 unit	54.714.968,00

2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	-	-
2.16.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Nilai PMPRB dinas Kominfo	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	-	-
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik	Singkawang	100%	571.511.505,00	APBD Kota	-	100%	1.293.087.368,70
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah	Singkawang	100%	571.511.505,00	APBD Kota	-	100%	1.293.087.368,70
2.16.02.2.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah perwako yang dibutuhkan	Singkawang	1 perwako	17.578.560,00	APBD Kota	-	1 perwako	26.555.130,00
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan/rekomendasi hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	2 laporan	50.000.000,00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi publik	Singkawang	100 konten	46.072.984,00	APBD Kota	-	100 konten	141.529.061,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah informasi/berita yang dipublikasikan	Singkawang	700 berita	350.828.363,00	APBD Kota	-	700 berita	508.693.872,00

2.16.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Jumlah informasi publik yang diublikasikan melalui website PPID	Singkawang	45 dok	16.157.862,00	APBD Kota	-	45 Dokumen	17.773.648,20
2.16.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Jumlah konferensi pers yang dilaksanakan	Singkawang	12 kegiatan	30.376.106,00	APBD Kota	-	12 keg	36.335.670,00
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah peserta pembinaan, pemberdayaan, dan desimilasi informasi melalui komunikasi	Singkawang	1300 orng	98.540.900,00	APBD Kota	-	1.300 orang	320.839.747,00
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	4 keg	35.000.000,00
2.16.02.2.01.10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebjikan layanan informasi publik	Singkawang	29 OPD	11.956.730,00	APBD Kota	-	29 OPD	19.840.850,00
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebjikan layanan informasi publik	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	29 OPD	35.000.000,00
2.16.01.2.01.13	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	100%	101.519.390,50

2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan aplikasi e-Government	Singkawang	100%	2.616.107.995,00	APBD Kota	-	100%	4.728.829.250,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	100%	2.386.766.395,00	APBD Kota	-	100%	3.665.452.290,00
2.16.03.2.02	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah domain dan subdomain pemkot Singkawang yang terbangun Jumlah ruang server yang dirawat	Singkawang	76 sistem 12 server	123.794.700,00	APBD Kota	-	90 sistem 17 server	195.000.000,00
2.16.03.2.03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah akses jaringan internet yang terkoneksi Jumlah CCTV yang terpasang Jumlah menara telekomunikasi yang dibangun	Singkawang	26 kelurahan 29 OPD 10 CCTV 1 menara telekomunikasi	2.262.971.695,00	APBD Kota	-	10 CCTV publik, 1 cctv analytic, 24 OPD, 5 kec dan 26 kel	3.470.452.290,00

2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Dilinkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan E-Government Dilinkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	100%	229.341.600,00	APBD Kota	-	100%	1.063.376.960,00
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Persentase koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Singkawang	50 %	39.127.200,00	APBD Kota	-	60%	71.470.710,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah pengembangan aplikasi Jumlah tenaga operator dan teknisi	Singkawang	3 aplikasi 5 orang	26.568.100,00	APBD Kota	-	50%	542.835.625,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Persentase pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah	Singkawang	50 %	138.646.300,00	APBD Kota	-	4 aplikasi 6 orang	199.070.625,00
2.16.03.2.02.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Indeks SPBE pemerintah kota Singkawang	Singkawang	2.25	25.000.000,00	APBD Kota	-	75%	250.000.000,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang data Sektoralnya Terintegrasi dengan Website	Singkawang	1 buku	175.620.300,00	APBD Kota	-	100%	730.000.000,00

2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	Singkawang	100%	175.620.300,00	APBD Kota	-	100%	480.000.000,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah laporan/publikasi database statistik sektoral Kota Singkawang	Singkawang	1 buku	175.620.300,00	APBD Kota	-	-	-
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Statistik Sektor Kota Singkawang	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	1 keg	150.000.000,00
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektor	Jumlah Laporan/Publikasi Metadata Indikator sesuai Dokumen Perencanaan Tahunan Kota Singkawang	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	1 buku	150.000.000,00
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur pendukung penyelenggaraan statistik sektoral	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	1 Paket	180.000.000,00

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Singkawang	100%	40.000.000,00	APBD Kota	-	100%	162.000.000,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	100%	40.000.000,00	APBD Kota	-	100%	162.000.000,00
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat keputusan Kepala Dinas tentang standar operasional prosedur tata kelola persandian dan keamanan informasi Pemerintah Kota dan indeks keamanan informasi (indeks KAMI)	Singkawang	1 dokumen	40.000.000,00	APBD Kota	-	2 Dok	100.000.000,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah kegiatan keamanan informasi pemerintah kota berbasis elektronik dan non elektronik	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	-	-

2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan peralatan pendukung keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	-	-	APBD Kota	-	3 paket	62.000.000,00
TOTAL					7.219.635.322,00				13.206.695.753,60

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, PALING SEDIKIT MENCAKUP
URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN, LOKASI, INDIKATOR KINERJA, PENERIMA
MANFAAT, PAGU INDIKATOF, PAGU PRAKIRAAN MAJU, SUMBER ANGGARAN
BAIK YANG MENGALAMI PERUBAHAN DAN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

**Tabel I RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022**

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	PENERIMA MANFAAT	INDIKATOR		PAGU INDIKATOR	PRAKIRAAN MAJU	SUMBER ANGGARAN	KETERANGAN
				OUTPUT KEGIATAN					
				TOLOK UKUR	TARGET				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Singkawang		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,542,779,134.90		APBD KOTA	
2.16.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singkawang		Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	54,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Singkawang		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	12,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Singkawang		Jumlah dokumen RKA	1 dok	6,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Singkawang		Jumlah dokumen RKA	1 dok	6,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Singkawang		Jumlah dokumen DPA	1 dok	6,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Singkawang		Jumlah dokumen DPA	1 dok	6,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Singkawang		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	6,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Singkawang		Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	4 dok	12,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Singkawang		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,758,363,277.56		APBD KOTA	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Singkawang		Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangannya	24 orang	3,736,763,277.56		APBD KOTA	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Singkawang		Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	7,200,000		APBD KOTA	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Singkawang		Cakupan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	7,200,000		APBD KOTA	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Singkawang		Jumlah laporan akhir tahun	1 dok	7,200,000		APBD KOTA	

2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Singkawang		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	10,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Singkawang		Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 dok	5,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Singkawang		Cakupan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	5,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Singkawang		Persentase Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	100%	28,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.04.04	Pendapatan objek dan pendaftaran objek retribusi daerah	Singkawang		Jumlah menara telekomunikasi yang didata	125 menara telekomunikasi	22,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.04.06	Penetapan wajib retribusi daerah	Singkawang		Jumlah dokumen SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	125 dok	6,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Singkawang		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Singkawang		Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 dok	6,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Singkawang		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	937,380,360.90		APBD KOTA	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Singkawang		Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	9,047,412.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Singkawang		Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	248,706,588.90		APBD KOTA	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Singkawang		Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 unit mobil	72,213,240.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Singkawang		Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	7,413,120.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Singkawang		Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	100%	600,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Singkawang		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	1,126,526,899.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Singkawang		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Mobil Operasional dan 2 kendaraan roda 2	560,000,000.00		APBD KOTA	

2.16.01.2.07.05	Pengadaan meubel	Singkawang		Jumlah meubel yang digunakan	1 paket	226,096,899.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Singkawang		jumlah pengadaan gedung kantor yang diadakan	1 unit	340,430,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,176,157,906.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Singkawang		Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100%	2,527,800.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	Singkawang		Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	100%	274,998,416.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Singkawang		Cakupan penyediaan jasa umum kantor	100%	898,631,690.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	147,994,968.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Singkawang		Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	100%	93,280,000.00		APBD KOTA	
2.16.01.2.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Singkawang		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	77 unit	54,714,968.00		APBD KOTA	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Singkawang		Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	1,293,087,368.70		APBD KOTA	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang		Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah	100%	1,293,087,368.70		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Singkawang		Jumlah perwako yang dibutuhkan	1 perwako	26,555,130.00		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Singkawang		Jumlah laporan/rekomendasi hasil monitoring opini dan aspirasi publik	2 laporan	50,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Singkawang		Jumlah konten yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi publik	100 konten	141,529,061.00		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan media komunikasi publik	Singkawang		Jumlah informasi/berita yang dipublikasikan	700 berita	508,693,872.00		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Singkawang		Jumlah informasi publik yang diublikasikan melalui website PPID	45 Dokumen	17,773,648.20		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.07	Layanan hubungan media	Singkawang		Jumlah konferensi pers yang dilaksanakan	12 keg	36,335,670.00		APBD KOTA	

2.16.02.2.01.09	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Singkawang		Jumlah peserta pembinaan, pemberdayaan, dan desimilasi informasi melalui komunikasi	1.300 orang	320,839,747.00		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.10	Manajemen Komunikasi Krisis	Singkawang		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 keg	35,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.11	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Singkawang		Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	19,840,850.00		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.12	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Singkawang		Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	29 OPD	35,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang		Persentase penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	101,519,390.50		APBD KOTA	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Singkawang		Persentase Penerapan aplikasi e-Government	100%	4,728,829,250.00		APBD KOTA	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang		Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,665,452,290.00		APBD KOTA	
2.16.03.2.02	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Singkawang		Jumlah domain dan subdomain pemkot Singkawang yang terbangun dan jumlah ruang server yang dirawat	90 sistem 17 server	195,000,000.00		APBD KOTA	
2.16.03.2.03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Singkawang		Jumlah CCTV yang terpasang, Jumlah akses Jaringan Internet yang terkoneksi dan Jumlah Menara telekomunikasi yang di bangun	10 CCTV publik, 1 cctv analytic, 24 OPD, 5 kec dan 26 kel	3,470,452,290.00		APBD KOTA	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Goverement Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Singkawang		Persentase Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,063,376,960.00		APBD KOTA	
2.16.03.2.06	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Singkawang		Persentase koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	60%	71,470,710.00		APBD KOTA	

2.16.03.2.07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Singkawang		Jumlah pengembangan aplikasi Jumlah tenaga operator dan teknisi	50%	542,835,625.00		APBD KOTA	
2.16.03.2.10	Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Singkawang		Persentase pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah	4 aplikasi 6 orang	199,070,625.00		APBD KOTA	
2.16.03.2.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Singkawang		Indeks SPBE pemerintah kota Singkawang	75%	250,000,000.00		APBD KOTA	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Singkawang		Persentase Perangkat Daerah yang data Sektoralnya Terintegrasi dengan Website	100%	730,000,000.00		APBD KOTA	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang		Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	100%	480,000,000.00		APBD KOTA	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Singkawang		Jumlah laporan/publikasi database statistik sektoral Kota Singkawang	-	-			
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Singkawang		Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Singkawang	1 keg	150,000,000.00		APBD KOTA	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Singkawang		Jumlah Laporan/Publikasi Metadata Indikator sesuai Dokumen Perencanaan Tahunan Kota Singkawang	1 buku	150,000,000.00		APBD KOTA	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Singkawang		Tersedianya infrastruktur pendukung penyelenggaraan statistik sektoral	1 Paket	180,000,000.00		APBD KOTA	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Singkawang		Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	162,000,000.00		APBD KOTA	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang		Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	162,000,000.00		APBD KOTA	

2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang		Jumlah surat keputusan Kepala Dinas tentang standar operasional prosedur tata kelola persandian dan keamanan informasi Pemerintah Kota dan indeks keamanan informasi (indeks KAMI)	2 Dok	100,000,000.00		APBD KOTA	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang		Jumlah ketersediaan peralatan pendukung keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	3 paket	62,000,000.00		APBD KOTA	
JUMLAH USULAN MUSRENBANG (1)									
JUMLAH USULAN RENJA (2)									
JUMLAH USULAN POKIR (3)									
JUMLAH TOTAL (1+2+3)									

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.

Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika harus sama dengan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2021 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Singkawang, Mei 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang



Dr. AHYADI, MM

Dembina Utama Muda

NIP. 19631123 199003 1 003